



Buletin
AgFor
SULAWESI
Agroforestry and Forestry
Agroforestri dan Kehutanan

Februari 2015

Isu edisi ini:

Siswa Magang di Tengah Petani Kopi Bantaeng

AgFor Sulawesi Kukuhkan Kerja Sama dengan Pemkab Boalemo dan Gorontalo

Mengenal Konflik Lebih Jauh

Langkah Awal Menyusun Strategi Pasca Proyek

Buletin AgFor

diterbitkan oleh:

Agroforestry and Forestry in Sulawesi

Penyunting:

Enggar Paramita

Desain dan tata letak:

Sadewa

Informasi lebih lanjut:

Enggar Paramita

Communications Officer

e.paramita@cgiar.org

Kunjungi situs kami:

www.worldagroforestry.org/agforsulawesi

Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo ini dipimpin oleh World Agroforestry Centre (ICRAF).

Siswa Magang di Tengah Petani Kopi Bantaeng

Oleh: Nicholas A. Roshetko



Wawancara dengan petani kopi di Campaga. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/James M. Roshetko)

Di pertengahan 2014, AgFor Sulawesi menerima seorang siswa magang, Nicholas A. Roshetko, pelajar sekolah menengah atas di Jakarta yang ingin mengetahui seluk beluk pemasaran komoditas kopi. Di bawah pengawasan Marketing Specialist proyek AgFor, Nicholas menyusun kuesioner dan berkelana ke Bantaeng, Sulawesi Selatan untuk berdiskusi dengan petani dan penjual kopi. Artikel berikut berisi rangkuman pengalaman dan temuan-temuan yang diperoleh Nicholas selama di Sulawesi.

Saya berkesempatan untuk melakukan magang di bawah bimbingan Bapak Aulia Perdana, Marketing Specialist dan Ibu Syarfiah Zainuddin, Marketing Facilitator proyek AgFor di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kegiatan magang ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penghasil kopi skala kecil, dengan berdiskusi dengan para petani kunci dan penjual tentang segmentasi pasar, penentuan target (*targeting*), penentuan posisi (*positioning*), dan diferensiasi produk. Saya menggunakan kuesioner sebagai panduan diskusi. Kuesioner dibuat untuk menggali informasi tentang kapasitas petani, metode produksi, permintaan dan persediaan, kemampuan, serta pengetahuan tentang pengembangan merek, promosi, dan pemasaran. Kegiatan magang



Kiri: Pak Amir memanen kopi di kebunnya. (Foto: World Agroforestry Centre/Yusuf Ahmad), kanan: Kopi yang telah disangrai. (Foto: World Agroforestry Centre/James M. Roshetko)

yang berlangsung Juni dan Juli 2014 lalu ini berkaitan dengan mata pelajaran bisnis yang saya ambil di sekolah saya, Academic Colleges Group International School di Jakarta.

Sebelumnya, langkah pertama yang saya lakukan adalah bertemu dengan tim pemasaran AgFor di kantor ICRAF di Bogor untuk membicarakan tujuan penelitian dan menyusun kuesioner. Marketing Specialist memberikan saya referensi bahan bacaan bertema pemasaran yang membantu memperluas pengetahuan saya.

Tanggal 1 Juli, saya terbang ke Makassar bersama tim AgFor. Kami melanjutkan perjalanan selama 4 jam ke arah selatan, yakni ke kota Bantaeng untuk bertemu tim lapangan, menyelesaikan kuesioner, dan memastikan jadwal turun lapangan. Hari berikutnya kami berkendara satu jam menuju Desa Pattaneteang untuk bertemu kelompok tani yang terdiri dari 10 orang. Dua di antaranya adalah Bapak Amiruddin dan Bapak Ramli, yang merupakan informan kunci saya. Mereka adalah petani sekaligus penjual yang memasarkan produknya lewat distributor besar di Makassar. Keduanya berperan sebagai penasihat pemasaran bagi para petani kopi di desanya. Seusai diskusi, Pak Amiruddin menunjukkan kebun kopinya dan mempraktikkan cara memproses kopi ke saya.

Di antara Desa Pattaneteang dan Bantaeng, terdapatlah Desa Campaga. Di sana, kami kembali bertemu dengan 7 orang petani yang tergabung dalam sebuah kelompok. Kami menemukan ada 3 jenis kopi yang dibudidayakan di kedua desa, yaitu arabica, robusta, dan liberica. Arabica adalah jenis yang paling banyak ditanam di kedua desa, diikuti dengan robusta, dan terakhir liberica. Jika dibandingkan dengan kedua jenis lainnya, liberica dianggap memiliki rasa paling pahit. Jenis ini juga memiliki hasil panen yang lebih sedikit, dengan harga jual lebih rendah. Kini liberica banyak digantikan oleh tanaman cengkeh, yang bagi petani dianggap lebih menguntungkan.

Arabica dipanen 3 kali setahun di Pattaneteang, namun hanya 2 kali di Campaga. Di Pattaneteang, ratusan kilogram arabica dihasilkan setiap tahunnya.

Sementara hasil panen Campaga lebih sedikit, yaitu berkisar di angka puluhan ton. Robusta hanya dipanen sekali setahun di kedua desa, dengan Pattaneteang mampu menghasilkan hingga ratusan ton, sementara Campaga lebih rendah, yaitu beberapa puluh ton. Sedangkan liberica juga hanya dipanen setahun sekali di kedua desa, dengan hasil beberapa puluh ton dari Pattaneteang, dan beberapa ton di Campaga.

Di dua desa tersebut, mayoritas petani membudidayakan kopi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AgFor, 27% dari lahan di Pattaneteang dan 39% di Campaga menggunakan sistem monokultur atau kebun campur kopi. Di Bantaeng, sistem kopi monokultur memberikan pengembalian lahan sebesar USD 518 per tahun, sementara kebun campur kopi lebih tinggi dengan USD 888. Akan tetapi, sistem kopi monokultur memberikan pengembalian tenaga kerja sebesar USD 19 per hari, sedangkan kebun campur kopi hanya USD 16.

Ada 4 jalur utama pemasaran kopi yang dilakukan oleh masyarakat di kedua desa yaitu: 1) menjual ke distributor besar di Makassar; 2) menjual ke distributor kecil di Bantaeng; 3) menjual ke pasar tradisional di Bantaeng; dan 4) menjual ke masyarakat lokal di desa masing-masing. Setiap desa hanya melakukan 3 dari 4 jalur pemasaran tersebut. Contohnya, Pattaneteang menjual ke distributor besar di Makassar, distributor kecil di Bantaeng, dan masyarakat lokal. Petani Campaga menjual ke distributor di Bantaeng, pasar tradisional di Bantaeng, dan masyarakat lokal.

Kebanyakan kopi dijual ke distributor di Makassar dan Bantaeng. Kebanyakan keuntungan pun diperoleh dari transaksi dengan kedua distributor ini. Keuntungan per unit lebih banyak dihasilkan ketika petani menjual ke masyarakat lokal dan di pasar tradisional. Namun, permintaan dari kedua pasar tersebut sangatlah terbatas.

Petani menerima sekitar Rp 35.000 per seratus kilogram dari distributor, namun jika dijual di masyarakat lokal atau pasar tradisional, 1 kilogram rata-rata dijual dengan harga Rp 10.000.

Ketika dijual ke distributor, kopi dijual mentah yaitu biji tanpa disangrai, atau bahkan masih berupa buah. Tetapi ketika dijual ke masyarakat, kopi telah disangrai atau dalam bentuk bubuk. Waktu dan modal yang dihabiskan untuk menjual ke distributor lebih sedikit: kopi dipanen, lalu langsung dijual. Sedangkan menjual ke masyarakat lokal membutuhkan lebih banyak waktu dan modal karena kopi harus dicuci, dikeringkan, disangrai, dan digiling: sebuah proses yang memerlukan minimal 3 hari untuk setiap hasil produksi.

Singkatnya, keuntungan per unit akan lebih besar diperoleh ketika menjual kopi ke masyarakat lokal, namun menjual ke distributor jauh lebih menguntungkan karena permintaan yang cenderung lebih besar, jumlah yang terjual lebih banyak, dengan proses yang lebih tidak terlalu memakan waktu.

Bagi saya, magang ini adalah pengalaman yang unik dan sangat menarik. Sebagai pelajar yang tinggal di Bogor dan bersekolah di Jakarta, saya terpukau dengan pembudidayaan, pemrosesan lebih lanjut,

dan penjualan, yang merupakan serangkaian tahapan untuk memproduksi kopi.

Saya menyukai kopi. Tapi sejujurnya, tidak pernah terbersit di benak saya, bagaimana kopi sampai bisa tersaji di cangkir saya. Melalui kegiatan magang ini, saya memiliki pemahaman lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan untuk menghasilkan secangkir kopi. Sekarang saya memiliki rasa hormat yang besar untuk para petani, kerja keras, serta dedikasi yang mereka berikan. Kini, setiap cangkir kopi yang saya nikmati memberikan saya kesempatan untuk merenung sejenak, sehingga kopi pun terasa lebih nikmat.

Saya merasa amat beruntung memiliki kesempatan untuk magang bersama AgFor, dan saya yakin ini akan berguna dalam memilih program studi di universitas dan karir saya. Satu karir yang menarik bagi saya adalah tentang bisnis yang menyediakan komoditas kepada masyarakat, namun dengan imbal balik yang adil dan pantas dari sisi produsen.

AgFor Sulawesi Kukuhkan Kerja Sama dengan Pemkab Boalemo dan Gorontalo

Oleh: Enggar Paramita

Setelah sepakat untuk berkolaborasi dalam bidang agroforestri, program Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo dan Gorontalo mengukuhkan komitmennya lewat penandatanganan Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan agroforestri (kebun campur) dan kehutan yang setara dan berkelanjutan.

Penandatanganan dengan Pemkab Boalemo berlangsung Hotel Putra Tunggal tanggal 5 November 2014. Keesokan harinya kesepakatan serupa ditandatangani dengan Pemkab Gorontalo di Hotel Limboto Indah.

Penandatanganan Nota Kesepahaman adalah tindak lanjut dari lokakarya peluncuran AgFor di Provinsi Gorontalo yang berlangsung Juni 2014, serta wujud komitmen kedua pihak untuk bekerja sama dalam bentuk: 1) kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan penelitian agroforestri; 2) penyebaran dan pertukaran informasi agroforestri; 3) pemberdayaan masyarakat berbasis agroforestri; 4) peningkatan tata kelola sumber daya alam dan ekosistem secara lestari.

Nota Kesepahaman yang merupakan hasil serangkaian diskusi dengan melibatkan dinas terkait ini akan



Bapak Hen Restu, Asisten 2 Bupati Gorontalo menandatangani Nota Kesepahaman. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Enggar Paramita)



Bupati Boalemo, Bapak Rum Pagau memberikan kata sambutan. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Enggar Paramita)

berlaku hingga Agustus 2016 dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Dr James M. Roshetko, Senior Project Leader AgFor Sulawesi mengatakan penandatanganan akan membantu penyelarasan rencana kegiatan.

Bupati Kabupaten Boalemo, Drs. Rum Pagau dalam pidato pembukaannya mengemukakan dalam dua tahun belakangan Boalemo telah banyak menarik dukungan baik dari pemerintah pusat maupun internasional. Menurutnya visi dan misi pemerintah Boalemo 'Menuju Masyarakat Produktif dan Mandiri' selaras dengan berbagai kegiatan dampingan, termasuk AgFor Sulawesi. Ia turut menghimbau kepada jajaran Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta pihak terkait lainnya agar mendukung kolaborasi.

Koordinator AgFor Sulawesi untuk Gorontalo, Duman Wau mengatakan dengan kakao sebagai tanaman yang diunggulkan di Boalemo, maka kerja sama dengan AgFor menjadi sangat relevan dan potensial, karena di kegiatan di 2 provinsi lainnya yakni Sulawesi Selatan dan Tenggara, AgFor banyak berkecimpung di pengelolaan kebun campur kakao. Ia yakin, AgFor dan Kabupaten Boalemo selain dapat saling berbagi pembelajaran dan informasi teknologi terkini tentang kakao, juga mampu mengembangkan model-model agroforestri kakao. Ia menambahkan bahwa AgFor dan Pemkab Boalemo telah bersepakat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan guna membahas rencana kerja masing-masing di tahun 2015, mengidentifikasi peluang kolaborasi, melakukan penyelarasan, dan membuat detail implementasi kegiatan.

Asisten 2 Bupati Gorontalo, Hen Restu dalam pembukaan acara menjelaskan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Gorontalo. "Akan tetapi masih banyak tantangan yang harus harus dicermati dan dicari solusinya, misalnya kualitas produk pertanian yang belum maksimal sehingga

belum bisa diekspor, lalu cara-cara pengelolaan lahan pertanian yang selama ini dipraktikkan seringkali belum memperhatikan aspek lestari, seperti banyaknya penggunaan pupuk non-organik," tuturnya. Ia berharap kegiatan AgFor akan menjadi sarana belajar bersama untuk saling mendukung kebangkitan pertanian di Kabupaten Gorontalo.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman dilanjutkan dengan pelatihan agroforestri yang melibatkan perwakilan kelompok tani binaan AgFor di masing-masing kabupaten. Pelatihan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai agroforestri dan merumuskan rencana kerja kelompok. Antusiasme petani binaan terlihat dari partisipasi aktif dalam melontarkan jenis-jenis kegiatan yang ingin dilakukan dalam setahun ke depan.

AgFor Sulawesi memulai kegiatan di Provinsi Gorontalo pada pertengahan 2014 dan kini berkegiatan di 4 kecamatan di Kabupaten Boalemo dan 5 kecamatan di Kabupaten Gorontalo.



Anggota kelompok tani mendiskusikan rencana kerja tahunan. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Enggar Paramita)

Mengenal Konflik Lebih Jauh

Oleh: Enggar Paramita



Kelompok berkunjung dan berdialog dengan masyarakat Alaloma. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Center for International Forestry Research/Hasantoha Adnan)

Konflik dalam lingkup pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan hutan di Indonesia seringkali terjadi. Pemberitaan di surat kabar dan televisi menentang sengketa antar kelompok mengenai hak penggunaan sepetak lahan bukanlah hal baru, tak terkecuali di Sulawesi Tenggara.

Contohnya konflik di pegunungan Nipa-Nipa di dekat Kota Kendari, di mana masyarakat berkeinginan untuk menggarap lahan pertanian di area hutan sedangkan pemerintah berusaha agar masyarakat segera beranjak dari kawasan hutan. Atau seperti perselisihan di Desa Wonuahua, Konawe, ketika tanah yang dibeli dari masyarakat lokal ternyata merupakan wilayah hutan produksi.

Di banyak kasus, konflik dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian karena pihak yang terlibat tidak tahu bagaimana menghadapinya.

Salah satu dari tujuan proyek Agroforestry and Forestry in Sulawesi (AgFor Sulawesi) yang didukung oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Canada adalah agar masyarakat dampingan di wilayah rawan sengketa dapat merespon dan menangani konflik dengan baik.

Menangani konflik memerlukan pemahaman, dan untuk mewujudkannya, komponen Tata Kelola proyek AgFor Sulawesi bekerja sama dengan Komunitas Teras dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Nipa-Nipa menyelenggarakan lokakarya dan pelatihan manajemen sengketa pengelolaan sumber daya alam.

Pelatihan berlangsung 26–29 November 2014 di Kendari dengan nara sumber Agus Mulyana dan Philip Manalu dari Center for International Forestry Research yang merupakan salah satu mitra dari proyek AgFor Sulawesi.

Peserta di antaranya berasal dari Desa Wonuahua, Kesatuan Pengelolaan Hutan Laiwoi, UPTD Tahura Nipa-nipa, dan beberapa Kelompok Tani Pelestari Hutan (KTPH). Kebanyakan dari mereka saat ini sedang menghadapi konflik walau intensitasnya berbeda-beda. Oleh karenanya pelatihan diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir agar peserta dapat merancang skenario penyelesaian konflik.

Dalam loka latih, peserta belajar tentang konsep pengelolaan SDA secara kolaboratif serta dampak-dampaknya. Peserta juga bersinggungan dengan topik penyebab serta unsur-unsur konflik. Agar informasi yang diberikan dapat lebih dipahami maka peserta diminta untuk berkaca pada pengalaman konflik yang pernah dihadapi, dan menganalisisnya berdasarkan unsur-unsur konflik yang dijelaskan.

Selanjutnya, peserta mendapat informasi tentang 3 sikap umum para pihak dalam merespon konflik, yaitu pasif, reaktif, dan proaktif. Sebagian peserta mengaku selama ini rata-rata respon mereka cenderung reaktif, yakni baru bertindak jika ada tindakan/kejadian.

Pemahaman peserta juga diperkuat dengan memperkenalkan berbagai instrumen untuk analisis konflik. Peserta lalu dibagi menjadi beberapa kelompok, dan tiap kelompok diminta untuk menerapkan 1 instrumen analisis pada pengalaman



Kelompok mendiskusikan sikap umum menghadapi konflik. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Center for International Forestry Research/Hasantoha Adnan)

1800-an dan dipasangnya tapal batas dan pelarangan masuk kawasan hutan tahun 1958. Di tahun 1971 dilakukan reboisasi dengan menanam jambu mete di kawasan hutan dan juga di lahan masyarakat. Konflik timbul ketika lahan masyarakat yang ditanami jambu mete dinyatakan sebagai kawasan hutan.

Temuan ini menggambarkan betapa pentingnya mengusut sejarah agar dapat memahami akar permasalahan, karena seringkali konflik adalah akibat perselisihan yang tak terpecahkan di masa lampau. Pemahaman yang komprehensif tentang akar masalah perseteruan akan membantu perencanaan solusi yang tepat.

Para peserta menganggap pelatihan konflik dan kunjungan lapangan memberikan perspektif baru untuk memahami dan menyikapi konflik yang dihadapi, serta mendorong mereka untuk lebih bersikap proaktif.

Kepala UPTD Tahura Nipa-Nipa, La Ode Yulardhi, berharap agar peserta dapat menjadi fasilitator dan mediator dalam menangani konflik di lingkungannya.

Hasantoha Adnan dari tim Tata Kelola mengatakan bahwa secara umum kegiatan pelatihan mampu memberikan pencerahan bagi peserta dalam menyikapi konflik yang dialami. "Sebagai upaya tindak lanjut kegiatan, para peserta juga kami minta untuk menganalisis konflik yang terjadi di daerah masing-masing, dan mempresentasikannya pada tahap kedua dari pelatihan yang akan dilaksanakan di awal 2015", ungkapnya.

Pelatihan resolusi konflik akan turut dilakukan di Sulawesi Selatan, dengan mengikutsertakan mitra AgFor dan juga jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal.

konflik yang mereka hadapi dan mempresentasikannya di depan kelompok lain. Melalui pembelajaran partisipatif ini, diharapkan seluruh peserta berkontribusi dan berbagi pengetahuan dengan peserta lain.

Untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari, nara sumber mengajak peserta untuk berkunjung ke Kelurahan Alolama di Kota Kendari. Di sana, terjadi sengketa atas lahan masyarakat yang diklaim sebagai area hutan, yang diwarnai dengan pengusiran warga tahun 1974 karena dianggap mendiami kawasan hutan. Tiap kelompok peserta ditugaskan untuk mempraktikkan penggunaan instrumen analisis untuk membedah kondisi di Alaloma.

Dari penelusuran kelompok, diketahui bahwa sengketa berawal pada kedatangan penduduk di tahun



Agus Mulyana, berbagi pembelajaran dengan peserta. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Center for International Forestry Research/Hasantoha Adnan)

Langkah Awal Menyusun Strategi Pasca Proyek

Oleh: Enggar Paramita

Sejak dimulai tahun 2011 hingga saat ini, proyek AgFor Sulawesi telah aktif menjalankan kegiatan di 8 kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Gorontalo. Proyek yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD Canada) ini akan berakhir di tahun 2016. Dan selayaknya proyek berjangka waktu tertentu lainnya, salah satu kekhawatiran utama ketika proyek hanya tersisa satu maupun dua tahun adalah, bagaimana menjaga keberlanjutan meski proyek telah berakhir.

Kini memasuki tahun keempatnya, AgFor Sulawesi merasa perlu untuk mengulas isu tersebut agar dapat mempersiapkan strategi terbaik, yang direncanakan dengan seksama, dan dapat memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam rapat rutin bersama pemangku kepentingan yang digelar akhir tahun lalu, AgFor Sulawesi sengaja menetengahkan *exit strategy* atau strategi pasca proyek sebagai agenda pembahasan utama.

Rapat koordinasi dilangsungkan 3 Desember 2014, di Hotel Best Western, Makassar, dan dihadiri oleh staf AgFor Sulawesi, mitra proyek, serta pemangku kepentingan yang terdiri dari akademisi, perwakilan pemerintah daerah, dan kelompok tani binaan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantaeng, Dr. Ir. Syamsu Alam, Msi mengatakan bahwa keberadaan

AgFor Sulawesi telah berhasil meletakkan pondasi dalam merintis peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya petani di Bantaeng. Lebih lanjut, Dr. Syamsu Alam yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bantaeng menegaskan, pemangku kepentinganlah yang nantinya memikul tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh AgFor.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hari Basuki, perwakilan dari Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada yang hadir dalam pertemuan. "Ketika nanti proyek berakhir, maka kepemilikan proyek pun bergeser. Apa yang telah dimulai oleh AgFor, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan LSM. Oleh karenanya, kita perlu memikirkan bagaimana kita mentransfer kepemilikan tersebut, dan bagaimana para pihak dapat bekerja sama dengan baik untuk melanjutkan cita-cita proyek," jelasnya.

Rapat koordinasi diawali dengan pemaparan kinerja dan perkembangan terkini dari tiga komponen utama proyek, yaitu komponen penghidupan, tata kelola, dan lingkungan. Selanjutnya tiap komponen menyampaikan ide-ide tentang strategi pasca proyek. Tak ketinggalan, sub-komponen pemasaran dan komunikasi ikut menguraikan gagasannya.



Dr. Ir. Syamsu Alam, Msi memberikan kata sambutan dalam pembukaan pertemuan. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Andi Prahmono)



Proses pemaparan isu tematik dan diskusi kelompok. (Foto oleh: World Agroforestry Centre/Andi Prahmono)

Konsep-konsep tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tema dan didiskusikan dengan pemangku kepentingan dalam sesi khusus. Tercatat 4 tema yaitu ketersediaan informasi, pemasaran, kemitraan dalam pengelolaan lahan dan jasa lingkungan, dan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang menjadi pokok pembahasan. Agar lebih terfokus, diskusi dilakukan dengan mengelompokkan peserta berdasarkan 2 provinsi utama yang akan mengaplikasikan strategi pasca proyek, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara untuk para pemangku kepentingan asal Gorontalo diberikan kebebasan untuk memilih grup.

Adu argumentasi dan berbagai masukan mewarnai jalannya diskusi, mencerminkan semangat partisipatif dan kebebasan berpendapat. Isu-isu yang dihadapi dan opsi-opsi langkah pasca proyek dikulik secara mendalam. Diskusi pun terbukti menjadi wadah untuk menampung berbagai persepsi dan gagasan yang mendukung perumusan strategi pasca proyek.

Dr. James M. Roshetko, Senior Project Leader AgFor Sulawesi menyatakan, walau AgFor masih akan

berjalan sampai dengan 2016 namun perencanaan strategi pasca proyek harus dilakukan sejak dini. "Ini karena karena proses yang sebenarnya bukan hanya membuat strategi dan mengimplementasikannya, namun lebih ke proses partisipatif yang kontinu. Dan ini semua diawali dari merencanakan konsep strategi dan melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk memberikan masukan tentang konsep tersebut," ungkapnya.

Ia menilai, diskusi yang berlangsung berhasil menyatukan konsep yang diajukan tim dengan masukan dari berbagai pihak. "Prosesnya memang tidak mudah, namun sangat produktif dan bermanfaat, karena kita berhasil memformulasikan poin-poin penting mengenai strategi pasca proyek," katanya.

Menurut Dr. Roshetko, rumusan tersebut akan digodok dan ditindaklanjuti tim masing-masing komponen di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Berikutnya, proyek AgFor Sulawesi juga akan membahas lebih detail perihal implementasi sekaligus menentukan strategi pasca proyek untuk Gorontalo di pertemuan koordinasi selanjutnya.